



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2020**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2019

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017–2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 19 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Hardiansyah, SE., MM
NIP.19620715 198303 1 017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Program dan Kegiatan	21
BAB IV. PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada tahun 2020.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 mengikuti tata cara dan

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - q. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - r. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019, mengacu pada APBD tahun berjalan, untuk lebih jelasnya dapat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1											
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja											
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)											
Kabupaten Kutai Kartanegara											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (o output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog/Keg s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Berjalan (2019)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan		
					Target RENJA Tahun 2019	Realisasi RENJA Tahun 2019 (TW-II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10=5+7	11=(10/4)	
2.06 01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
2.06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100%			68%			41%	
2.06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Lembar Materai	1,600	400	450	200	44%		600	38%
2.06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening (4 UPT)	1,978	622	336	168	50%		790	40%
2.06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit kendaraan	75	25	20	20	100%		45	60%
2.06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	orang	1,014	248	216	108	50%		356	35%
2.06 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	unit	45	0	5	2	40%		2	4%
2.06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	81	30	15	15	100%		45	56%
2.06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	30	12	6	6	100%		18	60%
2.06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	eksemplar	43,200	10,800	10800	5400	50%		16,200	38%
2.06 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	jenis	30	0	5	5	100%		5	17%
2.06 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman	Kotak	6,446	1,228	1228	609	50%		1,837	28%

2.06	01	01	19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	orang	397	162	73	36	49%		198	50%
2.06	01	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	orang	2,400	936	528	264	50%		1,200	50%
2.06	01	01	21	Penyediaan Jasa Perumahan	Jumlah jasa perumahan	UPTD	10	4	2	2	100%		6	60%
2.06	01	01	22	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	Dokumen	0	0	0	0	0%		0	0%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur		100%				57%			33%
2.06	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	unit kendaraan dinas	5	0	0	0	0%		0	0%
2.06	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	190	51	59	17	29%		68	36%
2.06	01	02	10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Buah	134	10	4	0	0%	Kegiatan TW III	10	7%
2.06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit kendaraan	55	20	10	10	100%		30	55%
2.06	01	02	24	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	3	0	1	1	100%		1	33%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100%				0%			0%
2.06	01	05	04	Fasilitasi Bekias	Jumlah Inovasi	Inovasi	3	0	1	0	0%	Kegiatan TW III	0	0%
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat Capaian Kinerja		100%				100%			50%
2.06	01	06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen	Laporan, Dokumen Perencanaan	32	8	8	8	100%		16	50%
				Program Penataan Administrasi Kependudukan			100%				29%			40%
					Cakupan KTP Elektronik									
2.06	01	6	20	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	Jumlah layanan KTP	KTP elektronik	175,000	75,000	40,000	40,000	100%		115,000	66%
				Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	KIA	158,525	36,000	10,000	0	0%	Kegiatan TW III	36,000	23%
				Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	Jumlah dokumen data	Dokumen	1	0	1	1	100%		1	100%
2.06	01	6	28	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penertiban	Lokasi	2	0	0	0	0%		0	0%
					Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah									
2.06	01	6	24	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah Akta	Kutipan Akta Perkawinan	1500	10	400	0	0%	Kegiatan TW III	10	1%
					Persentase Penerbitan Akta Kematian									
2.06	01	6	24	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	Jumlah Akta	Kutipan Akta Kematian	1500	66	450	0	0%	Kegiatan TW III	66	4%
					Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran									
2.06	01	6	17	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah Akta	Kutipan Akta Kelahiran	10000	1000	3000	500	17%		1,500	15%

2.06	01	15	25	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta	Peserta	122	0	36	0	0%	Kegiatan TW IV	0	0%
2.06	01	15	26	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	20,000	20,000	0	0	0%		20,000	100%
2.06	01	15	22	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah IPT. Kemhann	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	673	1000	250	25%		923	23%
2.06	01	15	33	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah IPT Kota	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	1,299	1000	250	25%		1,549	39%
2.06	01	15	34	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah IPT Muara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	1,200	1000	250	25%		1,450	36%
2.06	01	15	35	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah IPT Muara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	1,000	1000	250	25%		1,250	31%
				Program Kereserian Kebijakan Kependudukan	Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis		100%				11%			23%
				Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah RT yang menerima Laptop dan menguasai aplikasi teknis kependudukan	RT	3,058	647	577	0	0%	Kegiatan TW III	647	21%
					Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan		100%				21%			26%
2.06	01	15	21	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah jaringan yang dipelihara	Jaringan	76	19	19	19	100%		38	50%
2.06	01	15	08	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah data base	Database	3	0	1	0	0%	Kegiatan TW III	0	0%
2.06	01	15	29	Penyajian Informasi Kependudukan	Jumlah Informasi	enis Informas	18	6	4	1	25%		7	39%
2.06	01	15	16	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen	Dokumen	4	1	1	0	0%	Kegiatan TW III	1	25%
2.06	01	15	18	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Jumlah dokumen	Dokumen	4	1	1	0	0%	Kegiatan TW III	1	25%
2.06	01	15	30	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah dokumen	Dokumen	3	1	0	0	0%	Kegiatan TW III	1	33%
2.06	01	15	32	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta	Peserta	600	0	200	50	25%		50	8%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program/Kegiatan yang *belum* memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah:
 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian 0% dari target sebesar 100%.
 - Kegiatan Fasilitasi Bekias dengan target sebanyak 1 inovasi, capaian kegiatan ini sebesar 0%.
 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan capaian 29% dari target sebesar 100%.
 3. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dengan capaian 11% dari target sebesar 100%.
 - Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan dengan target sebanyak 1 database, capaian kegiatan ini sebesar 0%.
 - Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dengan target sebanyak 1 dokumen, capaian kegiatan ini sebesar 0%.
 - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri dengan target sebanyak 1 dokumen, capaian kegiatan ini sebesar 0%.
- b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 68%
 2. Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 57%.
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 100%.
- c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran untuk tahun 2019 tidak ada, mengingat kegiatan yang diselenggarakan baru berjalan dua triwulan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,

Tidak tercapainya target pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Keserasian Kebijakan Kependudukan, dikarenakan anggaran kas kegiatan tersebut berada pada triwulan III dan IV, hal ini menyesuaikan porsi kegiatan 20% pada triwulan I dan 20 % pada triwulan II, dan 30% pada triwulan III dan 30% pada triwulan IV, sesuai dengan arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat program dan kegiatan baru berjalan dua triwulan, hal tersebut belum akan mempengaruhi capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, kemungkinan peluang untuk mencapai target kinerja masih sangat besar, karena saat ini program dan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaan sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan proyeksi untuk Tahun 2020 dan 2021 kami sajikan dalam bentuk tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Realisasi Capaian					Proyeksi			Catatan Analisis			
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk	100	100	91%	94%	96%	98%	99%	90%	94%	96%	96%	98%	99%	
2	Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah	88	88	73%	78%	83%	88%	88%	63,29%	78%	79%	83%	88%	88%	
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	100	25%	50%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100	100	93%	95%	97%	98%	99%	91%	95%	96%	97%	98%	99%	
5	Cakupan RT memiliki laptop	3.058 RT	3.058 RT	547 RT	100 RT	1.177 RT	1234 RT	0 RT	280 RT (17,88%)	100 RT (21,15%)	1177 RT (59,64%)	1177 RT (59,64%)	1234 RT (100%)	100%	
6	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk pencapaian indikator Rasio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga, pada awal renstra telah mencapai 100 %, sehingga untuk indikator tersebut tidak dijadikan indikator kinerja pelayanan lagi, sedangkan untuk 6 (delapan) Indikator Kinerja lainnya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk, Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk, pada tahun awal Renstra telah mencapai mencapai 86,18%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 89,77% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 416.440 orang, sedangkan untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 95,95% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 457.025 orang atau lebih 2,95% dari yang telah ditargetkan sebesar 93%, atau lebih 6,18% dari capaian tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan ketersediaan blanko KTP-el yang tidak pernah kosong dengan didukung tambahan peralatan cetak KTP-el 4 unit dan tim perekaman keliling yang dilaksanakan oleh operator kecamatan bekerjasama dengan operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pemenuhan kebutuhan KTP-el dapat berjalan sesuai target, untuk diketahui Tahun 2017 ketersediaan blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 33.419 keping KTP-el, untuk Tahun 2018 ketersediaan blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 74.000 keping KTP-el, sehingga mengalami peningkatan pencetakan dan distribusi blanko KTP-el dari tahun sebelumnya dengan persentase kenaikan sebesar 221,43 %, untuk jumlah wajib KTP tahun 2017 adalah sebanyak 463.909 wajib KTP, sedangkan di tahun 2018 jumlah wajib KTP meningkat menjadi 476.331 atau meningkat sebanyak 2,68%, hal ini dikarenakan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,68%, anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator ini menggunakan anggaran APBD Tahun 2018 melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Operasional Pelayanan KTP elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp.358.529.900,00 dan APBN Tahun 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Kementerian Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.708.223.000,00.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya terus menerus dilakukan percepatan kepemilikan KTP-el dengan cara melihat data lokasi-lokasi di kecamatan mana saja yang capaiannya masih rendah untuk dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) perekaman dan memprioritaskan pencetakan KTP-el pada lokasi tersebut, untuk percepatan pencetakan KTP-el sebaiknya menambah alat cetak/printer KTP-el baru agar dapat mempercepat proses pencetakan KTP-el.

2. Rasio Pasangan Non Muslim ber Akta Nikah, untuk tahun 2018 adalah sebanyak 4.251 Akta Perkawinan yang telah diterbitkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang penerbitan Kutipan Akta Perkawinannya mencapai 3.815 dokumen, apabila dipersentasekan mengalami peningkatan capaian sebesar 11,43%, sampai akhir tahun 2018 Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan adalah sebanyak 95.330 dokumen Kutipan Akta Perkawinan, untuk persentasenya kami menganggap 100 % dalam penerbitan Akta Perkawinan, karena tidak adanya data pembanding jumlah orang yang menikah dalam setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tidak adanya data Perkawinan Penduduk Non Muslim secara keseluruhan, untuk itu disetiap tahunnya kami selalu melakukan kegiatan pelayanan langsung penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di beberapa kecamatan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) berdasarkan data dimana banyak terdapat penduduk non muslim.

3. Persentase Penerbitan Akta Kematian, untuk tahun 2018 adalah sebanyak 7.842 Akta Kematian yang telah diterbitkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 penerbitan Akta Kematian adalah sebanyak 1.328 lembar, maka dapat dipersentasekan mengalami peningkatan sebesar 591%, untuk persentase penerbitan keseluruhan kami menganggap 100 % dalam penerbitan Akta kematian, karena tidak ada data pembandingnya dalam setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tidak adanya data laporan kematian penduduk secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) berdasarkan data dimana banyak terdapat penduduk yang telah meninggal dunia, adapun untuk mengetahui data kematian penduduk sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan kantor Kecamatan.

4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, pada awal tahun Renstra telah mencapai 88,41%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 90,80%, untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 91,38% apabila dibandingkan dengan tahun 2017 kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 88,41%, maka terjadi peningkatan sebesar 2,97%, untuk diketahui data yang diakui adalah data yang ada didalam database dimana setiap orang/penduduk yang memiliki nomor registrasi atau nomor Kutipan Akta Kelahiran harus tercatat didalam database tersebut,

apabila orang/penduduk tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi tidak tercatat kedalam database maka hal ini tidak dianggap memiliki Kutipan Akta Kelahiran sampai nomor registrasi tersebut dicatat kedalam database barulah Kutipan Akta Kelahiran tersebut diakui secara jumlah kepemilikan, dengan demikian jika dilihat dari segi jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan maka terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang telah mencapai 612.677 dokumen (data manual), sedangkan tahun 2018 sebesar 619.301 dokumen Kutipan Akta Kelahiran (data yang tercatat didalam database), apabila dipersentasekan meningkat sebesar 1,07%, atau lebih 6.624 dokumen Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini tiap tahunnya mengalami peningkatan capaian kinerja, sehingga untuk ditahun-tahun selanjutnya agar dipertahankan kinerjanya tanpa harus menghilangkan kegiatan pelayanan langsung (jemput bola), selain dari itu terus melakukan inovasi pelayanan.

5. Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis

Kependudukan, pada awal tahun Renstra telah mencapai 8,7% atau sebanyak 267 RT, untuk capaian tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 280 RT, sedangkan untuk tahun 2018 terealisasi sebanyak 100 RT atau apabila dijumlahkan telah mencapai 647 RT dengan persentase sebesar 21,16%, untuk rencana ditahun 2019 kami menargetkan 1.177 RT atau mencapai 59,64%, sedangkan proyeksi tahun 2020 ditargetkan sebanyak 1.234 RT atau 100% sehingga pada tahun 2021 yang merupakan akhir tahun Renstra sudah seluruhnya terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu 3.058 RT.

Berdasarkan hasil capaian kinerja kegiatan ini sebaiknya ditahun yang akan datang agar dapat dilakukan perubahan pada harga dan spesifikasi teknis laptop yang diadakan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya sehingga dapat menambah kuantitas tanpa mengurangi kualitas laptop yang diadakan dengan menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, agar target yang ingin dicapai dapat terlaksana secara maksimal disetiap tahunnya.

6. Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan

, merupakan indikator kinerja yang telah dilaksanakan setiap tahun, untuk capaian tahun 2018 telah terealisasi 100%, dengan jumlah kegiatan pada APBD Tahun 2018 sebanyak 6 kegiatan, kegiatan ini juga didukung dari Dana Alokasi Khusus, sehingga layanan informasi dapat terealisasi 100%, sedangkan untuk tahun 2019 telah dianggarkan sesuai dengan target yang ditetapkan, untuk proyeksi

tahun 2020 tetap ditargetkan sesuai indikator kinerja yang dilakukan perubahan agar capaian kinerja kegiatan dapat terukur dengan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2019 baru berjalan dua triwulan, akan tetapi untuk capaian per 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan rata-rata capaian diatas 94,50 %, hal ini dikarenakan dari 6 (enam) indikator kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya sudah mencapai 94%, hanya satu indikator baru mencapai 78%, untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah kurangnya persediaan blangko KTP-el yang tersedia, mengingat ketersediaan blangko tersebut berdasarkan hibah dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu "Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil "

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Belum tersedianya gedung arsip mandiri yang representative, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program KTP Elektronik yang ditanda tangani Bupati dan Ketua DPRD.
2. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaannya;
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun gedung arsip mandiri yang representative dan terjaga keamanannya;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.06. 2. 06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan				16,306,557,900	2.06. 2. 06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan				16,603,198,100	
2.06 2. 06. 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				16,306,557,900	2.06 2. 06. 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				16,603,198,100	
2.06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	2,446,332,960	2.06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	2,446,332,960	
2.06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Jasa Surat Menyurat	400 lembar Materai	2,100,000	2.06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Jasa Surat Menyurat	400 lembar Materai	2,100,000	
2.06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun, Kembang Janggut,	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504 Rekening	78,720,000	2.06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun, Kembang Janggut,	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504 Rekening	78,720,000	
2.06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	20 unit kendaraan	40,000,000	2.06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	20 unit kendaraan	40,000,000	
2.06 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	5 unit	62,500,000	2.06 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	5 unit	62,500,000	
2.06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah Alat Tulis Kantor	18 jenis	458,313,100	2.06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah Alat Tulis Kantor	18 jenis	458,313,100	
2.06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	407,538,100	2.06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	407,538,100	
2.06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan	10.800 eksemplar	45,000,000	2.06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan	10.800 eksemplar	45,000,000	
2.06 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 jenis	20,000,000	2.06 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 jenis	20,000,000	
2.06 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Tenggarong	Jumlah Makanan dan Minuman	2.000 Kotak	47,500,000	2.06 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Tenggarong	Jumlah Makanan dan Minuman	2.000 Kotak	47,500,000	
2.06 01 01 19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar	Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	81 orang	536,214,000	2.06 01 01 19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar	Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	81 orang	536,214,000	
2.06 01 01 20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	468 O/B (39 orang)	428,447,760	2.06 01 01 20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	468 O/B (39 orang)	428,447,760	
2.06 01 01 21	Penyediaan Jasa Perumahan	Tenggarong	Jumlah jasa perumahan	2 UPTD	70,000,000	2.06 01 01 21	Penyediaan Jasa Perumahan	Tenggarong	Jumlah jasa perumahan	2 UPTD	70,000,000	
2.06 01 01 22	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Arsip	165.000 Dokumen	250,000,000	2.06 01 01 22	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Arsip	75.000 Berkas	250,000,000	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	532,073,840		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	532,073,840	
01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah pengadaan kendaraan	4 unit kendaraan roda 2	150,000,000	2.06 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah pengadaan kendaraan	4 unit kendaraan roda 2	150,000,000	
01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 unit	229,323,840	2.06 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	25 unit	229,323,840	
01 02 10	Pengadaan Meubeler	Tenggarong	Jumlah Pengadaan Mebeleur	60 buah	97,750,000	2.06 01 02 10	Pengadaan Meubeler	Tenggarong	Jumlah Pengadaan Mebeleur	60 buah	97,750,000	
01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	10 unit kendaraan	55,000,000	2.06 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	10 unit kendaraan	55,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100,000,000		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100,000,000	
01 05 02	Fasilitasi Tim BEKIAS	Tenggarong	Jumlah Orang	15 Orang	100,000,000	2.06 01 05 02	Fasilitasi Tim BEKIAS	Tenggarong	Jumlah Orang	15 Orang	100,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja	100%	158,579,000		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja	100%	158,579,000	
01 06 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Tenggarong	Jumlah dokumen	8 Dokumen	158,579,000	2.06 01 06 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Tenggarong	Jumlah dokumen	8 Dokumen	158,579,000	
01 01 07	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 dokumen	246,640,200	2.06 01 01 07	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 dokumen	246,640,200	
01 02 24	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 dokumen	50,000,000	2.06 01 02 24	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 dokumen	50,000,000	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	1,734,931,100		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	1,734,931,100	
01 5 08	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	18 Kecamatan	Jumlah layanan KTP	50.000 KTPel	225,000,000	2.06 01 5 08	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	18 Kecamatan	Jumlah layanan KTP	50.000 KTPel	225,000,000	
01 5 14	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	18 Kecamatan	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	57.000 KIA	400,868,000	2.06 01 5 14	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	18 Kecamatan	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	40.000 KIA	400,868,000	
01 5 15	Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	18 Kecamatan	Jumlah dokumen		-	2.06 01 5 15	Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	18 Kecamatan	Jumlah dokumen		-	
01 5 16	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	100,000,000	2.06 01 5 16	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	100,000,000	
	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	3 Kecamatan	Jumlah akta	450 Kutipan Akta Perkawinan	150,000,000		Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	3 Kecamatan	Jumlah akta	450 Kutipan Akta Perkawinan	150,000,000	
	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	3 Kecamatan	Jumlah akta	450 Kutipan Akta Kematian	150,000,000		Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	3 Kecamatan	Jumlah akta	450 Kutipan Akta Kematian	150,000,000	

	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	4 Kecamatan	Jumlah akta	3.000 Kutipan Akta Kelahiran	194,063,100			Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	4 Kecamatan	Jumlah akta	3.000 Kutipan Akta Kelahiran	194,063,100	Penambahan jumlah lokasi pelayanan langsung di kecamatan
	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenggarong	Jumlah peserta	72 Peserta	175,000,000			Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenggarong	Jumlah peserta	72 Peserta	175,000,000	
	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten	Tenggarong	Jumlah akta	Dokumen	-			Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten	Tenggarong	Jumlah akta	Dokumen	-	
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut	Kembang Janggut, Tabang dan Kenohan	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000			Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut	Kembang Janggut, Tabang dan Kenohan	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun	Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000			Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun	Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000			Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	
	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000			Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga	Jumlah akta	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	-			Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	-	
	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	11,334,641,000			Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	11,334,641,000	
	Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	18 Kecamatan	Jumlah RT yang menerima Laptop	1.234 Laptop	#####			Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	18 Kecamatan	Jumlah RT yang menerima Laptop	1.234 Laptop	#####	Pengurangan jumlah pengadaan laptop karena sudah diakomodir di APBDP 2019
	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	18 Kecamatan	Jumlah jaringan yang dipelihara	19 Jaringan	125,000,000			Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	18 Kecamatan	Jumlah jaringan yang dipelihara	19 Jaringan	125,000,000	Peremajaan Jaringan SIAK 18 Kecamatan dan Kantor Induk
	Pengembangan Data Base Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah data base	1 Database	125,000,000			Pengembangan Data Base Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah data base	1 Database	125,000,000	
	Penyajian Informasi Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah dokumen	4 Jenis Informas	125,000,000			Penyajian Informasi Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah dokumen	4 Jenis Informas	125,000,000	Penambahan jumlah belanja media informasi
	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000			Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000	
	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 Dokumen	85,000,000			Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 Dokumen	85,000,000	
	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 Dokumen	126,821,900			Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 Dokumen	126,821,900	
	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah peserta	200 Peserta	125,000,000			Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah peserta	200 Peserta	125,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat terdiri dari :

- a. Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Renja akhir SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk Tahun 2020 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan. (Lihat Table 2.5)

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Sesuai Tujuan Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 berisi Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 direncanakan berjumlah 6 Program dengan 40 Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD dan 1 Kegiatan dibiayai melalui Anggaran APBN, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp.18.977.988.100,00 dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBD sebesar Rp.16.603.198.100,00 dan APBN sebesar Rp.2.374.790.000,00, untuk rencana prakiraan maju tahun 2021 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp.8.880.169.000,- dengan jumlah Program sebanyak 6 Program dan 39 Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021. Tetapi untuk kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Perubahan Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2.06.2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				16,603,198,100			8,880,169,000	
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				16,603,198,100			8,880,169,000	
2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100 %	2,446,332,960		100%	2,446,332,960	
2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	400 lembar materai	2,100,000	APBD	400 lembar Materai	2,100,000	
2.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara	504 Rekening	78,720,000	APBD	504 Rekening	78,720,000	
2.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tenggarong	20 unit kendaraan	40,000,000	APBD	20 unit kendaraan	40,000,000	
2.06.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	Tenggarong	5 unit	62,500,000	APBD	20	62,500,000	
2.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Tenggarong	18 jenis	458,313,100	APBD	18 jenis	458,313,100	
2.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	7 jenis	407,538,100	APBD	7 jenis	407,538,100	
2.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Tenggarong	10,800 eksemplar	45,000,000	APBD	10.800 eksemplar	45,000,000	
2.06.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	10 jenis	20,000,000	APBD	10 jenis	20,000,000	
2.06.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman	Tenggarong	2,000 Kotak	47,500,000	APBD	2.000 Kotak	47,500,000	
2.06.01.01.19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	Tenggarong	81 orang	536,214,000	APBD	81 orang	536,214,000	
2.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	468 O/B (39 orang)	428,447,760	APBD	468 O/B (39 rang)	428,447,760	
2.06.01.01.21	Penyediaan Jasa Perumahan	Jumlah jasa perumahan	Kota Bangun dan Kembang Janggut	2 UPT	70,000,000	APBD	2 UPT	70,000,000	
2.06.01.01.22	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	Tenggarong	75,000 berkas	250,000,000	APBD	75.000 berkas	250,000,000	
2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur		100 %	532,073,840		100%	982,073,840	
2.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	Tenggarong	4 unit	150,000,000	APBD	1 Unit R4	600,000,000	
2.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Tenggarong	25 unit	229,323,840	APBD	25 Unit	229,323,840	
2.06.01.02.10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Tenggarong	60 unit	97,750,000	APBD	60 unit	97,750,000	
2.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tenggarong	10 unit kendaraan	55,000,000	APBD	10 unit kendaraan	55,000,000	
2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100 %	100,000,000		100%	100,000,000	
2.06.01.05.02	Fasilitasi Tim Bekias	Jumlah Inovasi	Tenggarong	1 Inovasi	100,000,000	APBD	1 Inovasi	100,000,000	
2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Capaian Kinerja		100 %	455,219,200		100%	455,219,200	
2.06.01.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring	Jumlah dokumen	Tenggarong	8 Dokumen	158,579,000	APBD	8 Dokumen	158,579,000	

2.06	01	01	07	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong	1	dokumen	246,640,200	APBD		1 Dokumen	246,640,200
2.06	01	02	24	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Tenggarong	1	dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
2.06	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				100 %	1,734,931,100			100%	4,109,721,100
					1. Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk			96%	725,868,000			100%	725,868,000
2.06	01	15	20	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	Jumlah layanan KTP	18 Kecamatan	50,000	KTP Pel (2%)	225,000,000	APBD		50.000 KTP Pel (2%)	225,000,000
2.06	01	15		Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	18 Kecamatan	40,000	KIA (20%)	400,868,000	APBD		20% (57.000 KIA)	400,868,000
2.06	01	15	23	Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	Jumlah dokumen data	18 Kecamatan	-		-	APBD			-
2.06	01	15		Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai	Jumlah Penertiban	2 Kecamatan	1	Lokasi	100,000,000	APBD		1 Lokasi	100,000,000
					2. Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah			80%	150,000,000			5%	150,000,000
2.06	01	15	24	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah akta	18 Kecamatan	450	Kutipan Akta Perkawinan	150,000,000	APBD		450 Kutipan Akta Perkawinan	150,000,000
					3. Persentase Penerbitan Akta Kematian			25%	150,000,000			25%	150,000,000
2.06	01	15		Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kematian	Jumlah akta	18 Kecamatan	450	Kutipan Akta Kematian	150,000,000	APBD		450 Kutipan Akta Kematian	150,000,000
					4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran			96%	709,063,100			2%	709,063,100
2.06	01	15	17	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah akta	18 Kecamatan	3,000	Kutipan Akta Kelahiran	194,063,100	APBD		3.000 Kutipan Akta Kelahiran	194,063,100
2.06	01	15	26	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta	Tenggarong	72	Peserta	175,000,000	APBD		72 Peserta	175,000,000
2.06	01	15	26	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai	Jumlah akta	Tenggarong	-	-	-	APBD		-	-
2.06	01	15	22	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Kembang Janggut, Tabang dan	1,000	Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	APBD		1.000 Akta Kelahiran	85,000,000
2.06	01	15	33	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis	1,000	Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	APBD		1.000 Akta Kelahiran	85,000,000
2.06	01	15	35	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana	1,000	Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	APBD		1.000 Akta Kelahiran	85,000,000
2.06	01	15	34	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga	1,000	Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	APBD		1.000 Akta Kelahiran	85,000,000
				Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan	Tenggarong	1	dokumen	-	APBN		1 Laporan	2,374,790,000
2.06	01	16		Program Keserasian Kebijakan Kependudukan				100 %	11,334,641,000			100%	786,821,900
					5. Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi	18 Kecamatan		100 %	10,547,819,100				
2.06	01	15		Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah RT yang menerima Laptop	18 Kecamatan	1,234	Laptop	10,547,819,100	APBD		0 Laptop	-
					6. Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan			100 %	786,821,900			100%	786,821,900
2.06	01	16	21	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah jaringan yang dipelihara	18 Kecamatan	19	Jaringan	125,000,000	APBD		19 Jaringan	125,000,000

2.06	01	16	08	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah data base	18 Kecamatan	1 database	125,000,000	APBD		1 database	125,000,000
2.06	01	16	29	Penyajian Informasi Kependudukan	Jumlah dokumen	18 Kecamatan	4 Jenis Informasi	125,000,000	APBD		4 Jenis Informasi	125,000,000
2.06	01	16	16	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen	Tenggarong	1 Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000	APBD		1 Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000
2.06	01	16	18	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Jumlah dokumen	Tenggarong	1 Aplikasi	85,000,000	APBD		1 Aplikasi	85,000,000
2.06	01	16	18	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen	Tenggarong	1 Dokumen	126,821,900	APBD		1 Dokumen	126,821,900
2.06	01	16	32	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta	Tenggarong	200 Peserta	125,000,000	APBD		200 Peserta	125,000,000

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2020. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021 dengan sebaik-baiknya;

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, 19 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Hardiansyah, SE., MM
NIP.19620715 198303 1 017